

Memecah Kebekuan Regenerasi Ulama

Umat Islam prihatin akan stok ulama yang kian menipis. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui jalur formal, non-formal maupun informal untuk mengkristal ulama dengan pemahaman keagamaan yang tak dangkal. Bisakah Ma'had Aly (pesantren tinggi) memenuhi harapan itu?

RUANG dosen jurusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, siang itu dipadati mahasiswa. Mereka antri untuk mengikuti praktikum *qira'ah* (membaca al-Qur'an, red). "Dua tahun terakhir, praktikum *qira'ah* menjadi kegiatan wajib, terutama bagi mahasiswa semester awal," kata Presiden DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kaisar Abu Hanifah kepada Subhi Azhari dari *the WAHID Institute*.

Banyak orang prihatin atas menurunnya kemampuan membaca kitab suci di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Padahal dalam rangking keahlian agama, itu adalah kemampuan terendah.

"Mereka harusnya mampu membaca dan memahami literatur-literatur klasik Islam, yang lazim disebut kitab kuning. Ilmu-ilmu penopang seperti *nahw*, *sharf*, *balaghah*, *mantiq* dan *ma'ani*, penting dikuasai," kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo.

Kenyataan sebaliknya diungkap Kama Rusdiana, dosen di universitas yang sama. "Praktikum *qira'ah* saja banyak yang tidak lulus *kok*," kata Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah ini.

Pandangan senada datang dari Direktur Pekapontren Depag Amin Haidari. Bahkan ia menilai, PTAI telah mengalami disorientasi. "Harusnya PTAI dipersiapkan untuk melahirkan ulama, tapi dalam kenyataannya tidak," katanya (baca: *Semua Ma'had Aly Bisa Diakui Pemerintah*).

Kebekuan regenerasi ulama itu juga pernah meresahkan para tokoh muslim. Untuk mengatasi masalah itu, organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun bergegas mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam 'alternatif'.

Seperti kisah KH As'ad Syamsul Arifin di penghujung tahun 80-an.

Pengasuh Ponpes Sukorejo, Situbondo itu gundah melihat banyak kiai sepuh NU meninggal dunia. Sedang generasi baru yang mampu mengemban misi keagamaan dan kemasyarakatan organisasi Islam terbesar itu, belum kunjung tampak.

Menurut Abdul Moqsih Ghazali dalam penelitiannya berjudul *Proses Pembelajaran di Ma'had Aly Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur*, dari gundahan itu KH As'ad berencana membentuk lembaga pendidikan yang secara khusus mempersiapkan lahirnya ahli fikih. Untuk itu, pada 1989, Kiai As'ad menggelar *halaqah* (forum diskusi, red) dengan mengundang tak kurang dari 100 kiai.

Mereka di antaranya KH Ali Yafie, KH Abdul Muchith Muzadi, KH Sahal Mahfudz, KH Abdul Wahid Zaini (alm.), KH Fahmi Saifuddin (alm.), KH Tolchah Hasan, KH Yusuf Muhammad (alm.) dan KH Masdar F. Mas'udi. Maka pada tahun 1990 berdiri Ma'had Aly Situbondo, bernama al-Ma'had al-Aly li al-'Ulum al-Islamiyah Qism al-Fiqh, dengan spesialisasi fikih dan ushul fikih.

Mulai tahun 2000, Ma'had Aly Situbondo telah membuka kelas perempuan, sehingga kemungkinan bagi hadirnya sosok perempuan yang ahli di bidang fikih semakin terbuka. Sejumlah buku hasil kreasi santri Ma'had Aly Situbondo telah diterbitkan, seperti *Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dan Kekuasaan* (LKis 2002) dan lain-lain.

Layaknya perguruan tinggi, Ma'had Aly -selanjutnya disingkat MA, juga memiliki kurikulum,

penjenjangan, masa studi, rekrutmen, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tapi sesuai watak pondok pesantren yang beragam, wujud MA pun berbeda-beda. "Pendidikan di MA Salafiyah Syafi'iyah Situbondo ditempuh selama tiga tahun. Sistem SKS juga diterapkan di sana," ujar Hendra Tirtana, alumni MA Situbondo 2002.

Dijelaskannya, dengan menambah beberapa prasyarat, santri MA Situbondo setara dengan lulusan Strata 2 (S2). Kendati fikih dan ushul fikih diutamakan, namun pelajaran lain tak dikesampingkan. "Malah sekarang ada *al-fiker al-hadits* (pemikiran kontemporer)," imbuh mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta ini.

Jika MA Situbondo mengambil spesialisasi fikih-ushul fikih, maka Ma'had Darus-Sunnah al-'Aly li 'Ulum al-Hadits Ciputat, Banten mengedepankan disiplin hadis dan ilmu hadis. "Malah kurikulum hadis dan ilmu hadis di sini lebih tinggi ketimbang S2 IIQ (Institut Ilmu Qur'an) maupun UIN," terang Abdullah Syafi'i Damanhuri, *musyrif* (asisten dosen) MA Darus-Sunnah.

Kitab-kitab yang diajarkan, imbuhnya, adalah kitab utama dalam hadis dan ilmu hadis, seperti *al-kutub al-sittah*, *Tadrib al-Rawi*, *al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, juga *Taysir Mushthalah al-Hadits*.



UIN Jakarta: Pabrik Generasi Ulama
Dok. The WAHID Institute

“Tapi bukan berarti kitab fikih seperti *Bidayah al-Mujtahid* atau kitab ushul fikih seperti *al-Asybah wa al-Nadhair* dilupakan begitu saja. Keduanya turut dikaji di sini,” jelasnya. Sistem SKS juga diterapkan di MA yang didirikan KH Ali Mustafa Yaqub pada 1997 ini. Pada akhir semester, mahasiswa juga diwajibkan membuat *risalah* (skripsi). “Santri menempuh pendidikan di sini selama delapan semester,” terangnya.

Ada juga MA yang diorientasikan mencetak ahli tafsir dan hadis, seperti MA al-Hikmah Sirampog, Brebes yang didirikan oleh KH Masruri Mughni. Mulanya, sejak 1984 ia berbentuk *Takhsishshush Qira'atil Kutub* yang dibangun untuk mengintensifkan kajian kitab kuning. Pada 1997 lembaga itu diubah menjadi MA dengan spesialisasi tafsir-hadis.

Mahasantrinya juga diwajibkan menulis *risalah* di akhir semester. “MA ini bekerja sama dengan STAISA (Sekolah Tinggi Agama Islam Sholahuddin al-Ayyubi) Jakarta untuk memperoleh ijazah S1,” tulis Marzuki Wahid dalam artikel berjudul *Ma'had Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang* (Tashwirul Afkar XI/2001).

Lain lagi MA Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya yang didirikan KH Choer Affandi, pada 1980. Seiring keahlian pendirinya, MA dengan masa studi tiga tahun ini difokuskan pada bidang akidah. Kitab-kitab yang diajarkan misalnya, *Ghayab al-Wushul*, *Uqud al-Juman*, *Fath al-Wahhab*, dan sebagainya.

Karena masih menerapkan sistem salaf seperti *halaqah* (diskusi), *bandongan* (kiai membaca kitab dan santri-santri mencatat keterangannya) dan *sorogan* (santri satu persatu membaca kitab di hadapan kiai), MA ini dinilai masih kental sistem pendidikan tradisionalnya. “Di sana tidak dikenal SKS,” jelas Dudung Abdurrahman dalam penelitiannya, *Membangun Konsep Pendidikan Ma'had Aly* (Istiqro' Vol. 3 No. 1/2004).

Sedang MA Islam al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang didirikan pada 1988, menamakan keahlian dakwah. Lembaga di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim Muslim al-Mukmin yang dibidani Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Baraja' ini, memformulasi ilmu-ilmu keislaman dan modern.

“Selain mengajarkan tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, hadis, akhlak, juga mengajarkan psikologi, sosiologi, hukum, metodologi riset dan sebagainya, dengan sistem SKS,” ungkap Dudung.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan corak itu, tujuan awal didirikannya MA adalah untuk mengantisipasi krisis ulama, sama halnya dengan pendirian pesantren tinggi di

lingkungan Muhammadiyah (baca: *Candradimuka Kader Unggulan*). “MA merupakan institusi pencetak ulama yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama penguasaan kitab-kitab klasik yang menjadi referensi para ulama. Dalam beberapa unsur, ia setingkat dengan perguruan tinggi, tapi lebih fokus pada pendidikan tinggi bertradisi pesantren,” jelas Dudung.

Namun demikian, MA tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi Islam yang lain seperti Institut Agama Islam (IAI) atau Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) baik negeri maupun swasta. Ijazah formal dan ujian persamaan untuk memperoleh ijazah negara, juga tidak pernah dikeluarkan MA kepada santri yang telah lulus.

“Secara *hardware* dan *software*, pendidikannya seperti pondok pesantren, dengan berbagai kultur dan tradisi yang melingkupinya. Tapi karena kekhususannya, MA di berbagai pesantren diberi fasilitas khusus seperti asrama, ruang kelas, perpustakaan dan sarana aktualisasi seperti penerbitan atau ceramah di luar ponpes,” jelas Marzuki Wahid.

“Hal lainnya, adalah metode pembelajaran yang melibatkan santri sebagai subyek belajar, kitab yang dikaji relatif tinggi dan cara mengkaji yang lebih kritis,” imbuhnya.

Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan Departemen Agama Imam Syafe'i mengungkap, sebanyak 25 MA telah mendaftar ke instansinya. Lembaga-lembaga itu antara lain berada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa dan Nusa Tenggara Barat.

“Tapi baru satu MA yang diakui pemerintah yaitu MA Salafiyah Syaifiyah, Situbondo. Sisanya masih mengikuti standarisasi kurikulum,” kata Imam Syafe'i kepada Rumadi dari *the WAHID Institute*.

Saat ini sebagian besar MA dan pesantren tinggi yang ada tampak masih dalam perjuangan antara hidup dan mati. Ada dugaan kuat, kendala-kendala teknis seperti persediaan dana yang relatif minim karena hanya mengandal-

kan cadangan uang pesantren, menyebabkan MA kurang lincah dalam bergerak. Menurut Abdul Moqsith Ghazali, sebagian besar MA tak ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Buku-buku yang tersedia dalam rak-rak perpustakaan MA juga sangat terbatas.

“Ini artinya mengelola lembaga pendidikan dengan tuntutan yang demikian tinggi tak cukup hanya dengan bermodal semangat dan niat baik. Ada yang harus dipenuhi seperti perpustakaan yang lengkap, di samping dosen yang bagus dan lingkungan belajar yang kondusif,” kata kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Terlepas dari produk yang belum maksimal itu, apresiasi terhadap para pendiri MA dan pesantren tinggi tetap harus diberikan. Komitmen para kiai dan ulama untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas santri dan mengatasi kelangkaan ulama yang bermutu di negeri ini patut dipuji.

Itulah upaya menghindari dendangalan pemahaman ilmu



Wisuda Santri-Sarjana Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah 2005. Dok. Nurul H.M.

keislaman, yang menurut KH Abdurrahman Wahid sebagai sumber konservatisme, bahkan terorisme.

Kita tak pernah bisa membayangkan, apa jadinya sebuah negeri yang hanya dimuati oleh taburan fatwa para ulama ‘karbitan’ yang berkualifikasi rendah. Kata Rasulullah SAW, mereka akan berfatwa tak berdasarkan ilmu, sehingga mereka berada dalam ketersesatan dan akan menyesatkan.[]

Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi dan A. Suaedy



Semua Ma'had Aly Bisa Diakui Pemerintah

Wawancara H. Amin Haidari, MA.

Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag RI

Keberadaan Ma'had Aly masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari kompetensi alumni, standarisasi kurikulum hingga pengakuan pemerintah. Pemerintah telah memiliki rencana untuk mengatasi problem itu. Berikut wawancara Subhi Azhari dari *the WAHID Institute* dengan Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag RI Drs. H. Amin Haidari, MA.

Bisa dijelaskan pandangan Anda tentang Ma'had Aly (MA)?

MA merupakan pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama (*tafaqquh fi al-din*). Ini tentu berbeda dengan madrasah yang menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. MA juga sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan, misalnya nilai kemandirian, tradisi keilmuan, nilai-nilai kesederhanaan, dan ketokohan kiainya. Karena MA berfungsi sebagai lembaga pengkaderan ulama, maka lembaga ini berorientasi pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman.

Bagaiman posisi MA dalam sistem pendidikan nasional?

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi, MA itu ada dua model. MA formal yang mengikuti aturan Perguruan Tinggi (PT) dan MA *takhashshush* yang tidak terikat dengan PT. Posisi MA formal berbeda dengan MA *takhashshush* yang ada di pesantren-pesantren. MA *takhashshush* itu masuk dalam kategori pendidikan keagamaan non-formal.

Mana yang mendapat pengakuan pemerintah?

Keduanya bisa dapat pengakuan dari pemerintah, seperti ditegaskan dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan) No. 19 tahun 2005 pasal 93. Namun pengakuan itu disesuaikan dengan MA bersangkutan. Jika MA itu formal, maka lulusannya berhak mendapat legalisasi formal (ijazah PT, *red*), baik untuk S1, S2, atau S3. Sedangkan MA nonformal, pengakuannya diberikan dalam bentuk sertifikat *takhashshush* sesuai keilmuan yang dikaji. Nantinya, sebagai lembaga pendidikan keagamaan tinggi, MA harus mengikuti ketentuan PT. MA yang setara S1 misalnya, harus menggelar kajian-kajian keilmuan dengan bobot minimal 140 SKS.

Lalu apa bedanya dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)?

PTAI telah mengalami disorientasi. Harusnya PTAI dipersiapkan untuk melahirkan ulama, tapi dalam kenyataannya tidak. Karena itu, jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan yang sama.

Langkahnya bagaimana?

Harus ada akreditasi. Kontrol terhadap kualitas MA itu sendiri dilakukan oleh pakar yang bersangkutan atau praktisi MA, semacam Dewan MA yang terdiri dari pakar dan tokoh pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Dalam konteks ini, Depag hanya berfungsi administratif dalam pengembangan MA.

Bagaimana cara MA mendapat penyetaraan?

Penyetaraan MA dilakukan melalui

usulan dari MA ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Memang, legalitas formal hanya dikeluarkan oleh BSNP, tetapi penentuan itu didasarkan pada rumusan yang sebelumnya kita sepakati. Kami, Direktorat Peka-pontren hanya mengesahkan usulan yang diajukan dari setiap MA yang bersangkutan.

Selama ini apakah sudah ada MA yang disetarakan?

Ini memang sudah dilakukan di MA Salafiyah Syafiiyah Situbondo untuk setara S2.

Saran Anda untuk MA selanjutnya?

MA ke depan harus mampu melahirkan ulama yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dan tradisi akademik perguruan tinggi. []

"GLOBALUTION"

Mastuhu

Guru Besar Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

KATA "globalution" serumah dengan kata "globalisasi". Dua kata tersebut mempunyai karakter dasar yang



sama, yaitu amat cepat mendunia. Dinamika kehidupan bergerak dan berubah dengan semakin cepat. Sesuatu yang di a n g g a p baik dan berharga, dalam hitungan jam, bahkan menit, dapat berubah menjadi tidak baik dan tidak be-harga, kemudian ditinggalkan.

Dalam globalisasi, hal yang profan dan sakral dapat terjadi dan hadir dalam waktu dan tempat yang sama, bahkan pada orang yang sama. Pada suatu saat ia

mampu menampilkan dirinya sebagai orang yang "saleh" sekaligus sebagai "pecundang". Pemimpin yang lantang menyuarakan kepentingan rakyat, namun ia juga selingkuh dan korupsi.

Negara-negara dunia berkembang sesungguhnya menyadari, jika tidak ingin tertinggal dan terisolasi, mereka harus mampu hidup dalam tatanan kehidupan modern dan mengikuti aturan-aturan globalisasi. Tetapi negara-negara pemberi hutang (*creditor*) yang dihadapi semakin berdaya karena kekuatan sains dan teknologi, sedang mereka (*debitor*) semakin tidak berdaya. Sejak di sinilah muncul istilah "globalution" yang oleh Thomas Friedman disebut "*revolution from beyond*".

Candradimuka Kader Unggulan

PONDOK Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah (UMS), kerap disebut Pondok Shabran adalah salah satu pesantren tinggi yang dimiliki Muhammadiyah. Gedung pondok ini berasal dari wakaf Hajjah Nuriyah Shabran kepada UMS pada tahun 80-an, sehingga nama sang pewakaf diabadikan sebagai nama pondok itu.

“Pondok Shabran didirikan sebagai bagian dari program UMS,” ujar Direktur Pondok Shabran Syamsul Hidayat kepada Nurul H. Maarif dari *The Wahid Institute*.

Tak beda dengan Ma’had Aly yang berada di bawah naungan pesantren-pesantren NU, alasan pendirian pondok di bilangan Saripan Makamhaji Kartasura, Surakarta ini juga untuk menenggalangi kian langkanya ulama di Muhammadiyah.

“Pondok Shabran didirikan untuk mengatasi kelangkaan ulama. Karena itu, peserta diseleksi dengan ketat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia,” ujar Syamsul.

Mahasiswa S3 jurusan Akidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengatakan Pondok Shabran adalah candradimuka kader unggulan Muhammadiyah. Untuk mewujudkan

nya dibuat kesepakatan antara PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah seluruh Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Lulusannya diharapkan menjadi ujung tombak penerus perjuangan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah di masa yang akan datang,” jelas Syamsul.

Diungkap Syamsul, seluruh santrinya berlatar belakang mahasiswa. “Layaknya perguruan tinggi, pendidikan di sini ditempuh selama empat tahun dengan sistem SKS,” katanya. Pelajaran pokok di pondok ini antara lain Dakwah dan Pemikiran Islam, dan Tafsir Hadits.

Tak sebatas teori, pondok ini juga menerjunkan santrinya ke masyarakat. “Dakwah di masyarakat seperti pada bulan Ramadhan, pembinaan masjid dan majlis taklim, juga menjadi program di sini,” jelas Syamsul.

Menurut Syamsul, pondok yang kini dihuni 40 santri putra dan 30 santri putri ini, turut berperan mencairkan kebekuan hubungan antara Muhammadiyah dengan NU. “Selain mengkaji tradisi Muhammadiyah, santri-santri di sini juga mengkaji tradisi NU dan ormas-ormas lain,” kata alumni UMS ini.

Bahkan pondok ini acap bekerjasama dengan pesantren mahasiswa

yang berada di bawah naungan NU, semisal Ponpes Mahasiswa al-Muayyad, Windan, Surakarta asuhan KH Dian Nafi’, untuk menggelar seminar, terutama perihal ke-NU-an dan Ke-Muhammadiyah-an.

Dihentikannya seleksi kader santri dari cabang dan ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia pada 1993, mengakibatkan santri pondok itu semakin sedikit. “Jadi sekarang tergantung yang minat saja,” jelas Syamsul.

Namun dia mengakui, kualitas santri yang mendaftar kian hari kian menurun. Penyebabnya, tak banyak calon santri yang memiliki latar belakang keahlian membaca kitab klasik.

Karena itu, untuk mengembalikan masa keemasan, pondok ini tidak lagi menerima santri sejak dua tahun belakangan. “Kami mau menata ulang Pondok Shabran,” katanya optimis.

Gamal Ferdhi, A. Suaedy



Pondok Shabran dalam berbagai aktifitas
Dok. Pondok Shabran

Belajar dari pengalaman, maka tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membangun negara ini dengan kekuatan dari dalam, *local indigeneous* dan *local wisdom*. Tidak ada ceritanya negara merdeka dan terhormat yang dibangun dengan kekuatan dari luar, kecuali negara boneka.

Pada titik inilah saya ingin masuk pada problem pengelolaan lembaga pendidikan (tinggi) Islam, terutama tumbuhnya Ma’had Aly (MA) atau pesantren luhur (tinggi) di beberapa pesantren. Sudah dibuktikan sejarah bahwa pesantren dengan berbagai variasi kelembagaannya mampu bertahan hidup dalam berbagai situasi, namun kini tantangannya lebih berat karena menghadapi *revolution from beyond*.

Sebagaimana kita ketahui, satu

dasawarsa terakhir banyak pesantren yang mengembangkan Ma’had Aly dengan spesifikasi tertentu. Institusi ini cukup menarik kehadirannya, baik dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi di pesantren maupun relevansinya dengan pengembangan PTAI. Kemunculan Ma’had Aly, disamping upaya merevitalisasi keilmuan pesantren juga merupakan kritik atas PTAI seperti IAIN/UIN/STAIN yang kompetensi keulaman alumninya semakin dipertanyakan. Karena itu, MA bukan saja harus *comparable* dengan PTAI lainnya, tapi harus menawarkan nilai lebih.

Salah satu problem krusial pengelolaan lembaga semacam MA adalah bagaimana menyelaraskan antara kehendak “birokrasi pendidikan”

(dalam hal ini Depag) dengan suasana kemandirian yang menjadi *nature* pesantren (MA). Harus diakui, Depag adalah lembaga birokrasi, bukan lembaga akademik. Selama ini, lembaga akademik ditundukkan dan harus mengabdikan pada lembaga birokrasi, sehingga muncul term “diakui”, “tidak diakui”, dan sebagainya yang bisa mengarah pada diskriminasi lembaga akademik.

Ke depan, menurut saya, paradigmanya harus digeser, “lembaga birokrasi” harus melayani “lembaga akademik” dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kesadaran seperti itu, MA dan pesantren akan mampu menghadapi *revolution from beyond*, tidak diombang-ambingkan dan menjadi korban dunia global.***